

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

1. PETUGAS PERSIDANGAN

Desk : 4 (Empat)
 Provinsi : Jawa Timur
 Pimpinan Sidang 1 : Togu Pardede, ST., MIDS
 Pimpinan Sidang 2 : Abdul Malik Sadat Idris, ST., M.Eng
 Notulis Aplikasi : Tiara Ika Fariha, S.P.W.K.
 Notulis Offline: Siti Muslimah Sulaeman, S.Gz.
 Pembahas :

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda Provinsi Jawa Timur 2. Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur 3. Dinas Perhubungan Jawa Timur 4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur 5. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Jawa Timur 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur 7. Bappeda Kota Blitar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 4. Kementerian Kesehatan 5. Kementerian Ketenagakerjaan 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Lingkungan Hidup 2. Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika 3. Direktorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi 4. Direktorat Agama, Pendidikan & Kebudayaan 5. Direktorat Pendidikan Tinggi, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 6. Direktorat Ketenagakerjaan 7. Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional 8. Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

	9. <i>Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika</i>	9. <i>Direktorat Sumber Daya Air</i> 10. <i>Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana</i> 11. <i>Direktorat Transportasi</i>
--	--	--

2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
1	Pembangunan IPLT Kabupaten Mojokerto	1	1	Paket	Kab. Mojokerto	Kementerian PUPR	DIAKOMODIR Catatan : Update DED Karena Saat Ini Masih Update di 2020		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 – Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		15 Lingkungan Hidup Berkualitas			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Bappeda Jawa Timur : - Ada IPLT yang lama □ tidak berfungsi karena ada beberapa kerusakan		Kementerian PUPR : - Ada di database terkait usulan ini - Apakah akan menggunakan lahan yang berbeda dengan yang		Dit. PERKIM : - Sudah memiliki IPLT dan kondisi rusak □ ingin klarifikasi apakah rusak berat atau bagaimana, mohon informasi IPLT					

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan Kab/Kota □ Lahan □ Aset Kab. Mojokerto - Ada DED/FS/keterangan minat dari pemkab Mojokerto dan diharapkan bisa terakomodir - Anggaran 24 Milyar - RC terpenuhi dan sudah siap fisiknya <p>Tanggapan atas Dit Perkim (Bappeda dan Kab. Mojokerto)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rusak ada kebocoran - Kondisi reception point berkarat, tertutup semen ada penyumbanangan, kolam stabilisasi kondisi ada penyumbatan dan rembesan, unaerobic filter ada limbah cair di dalamnya, tutupnya rusak. Horizontal filter kondisi kering tidak ada supply, kolam tidak dalam mengalir ke badan Sungai 	<p>sebelumnya? Atau ada lokasi baru?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengoptimalan IPLT akan masuk ke kebijakan OPOR - Lahannya sudah ready dan clear 	<p>yang rusak ini dari kapan dan milik siapa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klarifikasi ke PUPR - Perlu ada perbaikan - Calon penerima manfaat □ siapa saja yang akan menjadi pelanggan IPLT? □ regulasi seperti apa? Pengelola? Tarif? - Truk tinja sudah ada kah? Bagaimana kondisinya? - DED tahun 2020, apakah aka nada updating lagi selaras dengan nantinya siapa penerima manfaatnya - Nomenklatur tetap yang sama bukan optimalisasi 	
--	--	--	--	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<ul style="list-style-type: none"> - Dulu dibiayai APBN tahun 2004, usia bangunan 20 tahun - Aset sampai hari ini belum diserahkan ke PEMDA, saat ini masih milik pusat. - Eksisting, dibangun di lahan dengan TPA, luasnya 2ha, ada dua desa di wilayahnya <p>Tanggapan Kab. Mojokerto atas PUPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di Kab. Mojokerto ada dua yang ditawarkan □ di kondisi exist atau di lahan baru namun saat ini masih menjadi milik Pemkab Mojokerto (ini masih satu kesatuan dengan IPLT yang lama) - DED sudah update tahun 2023 - Posisi IPLT di pusat perkotaan, di wilayah kec. 			
--	--	--	--	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		Mojosari, cakupan layanannya tinggi.							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
2	Penggantian dan Duplikasi Jembatan Modangan	1	1	Paket	Kab. Blitar Kab. Malang	Kementerian PUPR	<p style="text-align: center;">DIAKOMODIR</p> <p style="text-align: center;">Catatan :</p> <p>Pengecekan Lahan (Memastikan Clean and Clear Lahan)</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02- Transformasi Ekonomi		02 – Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		07 – Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)		Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU - AP) Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Jatim : <ul style="list-style-type: none"> - Pendukung salah satu penuntasan jalan mancala - Perbatasan kab malan, wates, blitar 		Kementerian PUPR : <ul style="list-style-type: none"> - Diakomodir, memang jembatan ini dalam kondisi kritis dengan skor 4□ akibat pergerakan tanah 		Dit. Transport <ul style="list-style-type: none"> - Perlu pengecekan lahan 			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<ul style="list-style-type: none"> - Rusak berat (point 4 atau kritis) - Tembok retak - Jembatan diganti dengan baja, beton - 80 m dan 7m - DED 2024 - Kesiapan lahan sudah clear - Keberadaan jembatan ini untuk pendukung sirip pancela - 42M anggaran - Dengan lahan exist dan tidak ada pelebaran <p>Bina Marga Prov. Jatim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jembatan dibangun 2006 - Di ruas pansela sampai batas kab malang - Mengalami kerusakan di bagian bawah dan ada keretakan - Dilakukan renovasi oleh balai besar karena kondisinya rusak skor 4 = rusak berat □ 	<ul style="list-style-type: none"> - Terletak di pansela di ruas Kab. Malang 		
--	--	--	---	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		direkomendasikan untuk penggantian dengan spesifikasi lantai beton							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
3	Pengendalian Lahar Gunung Semeru	1	1	Paket	Kab. Lumajang	Kementerian PUPR	<p style="text-align: center;">DIAKOMODIR</p> <p style="text-align: center;">Catatan :</p> <p>Menunggu Aktivasi Loan dan Sign Loan Agreement</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 – Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		Prasarana pengendali lahar yang direhabilitasi			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Jatim : <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi dan rekonstruksi lahar gunung semeru - Ada 3 jalur Sungai 		Kementerian PUPR : <ul style="list-style-type: none"> - Telah melakukan penanganan melalui SDA - Kedepannya ada kegiatan learn kegiatan pengendalian gunung 		Pimsid : <ul style="list-style-type: none"> - Perlu clearence apakah tanggul dulu atau bagaimana 			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan sudah ada dan diproses di tahun 2008 oleh JICA - Rencana kedepan, harapannya 732M untuk 3 jalur Sungai - Dibantu oleh JICA, ada tanggul u/ pengendali lahar - Untuk lahannya posisinya di Sungai, tidak ada pembebasan lahan - Belum ada dana yang besar, saat ini hanya memperbaiki dari belanja tidak terduga prov Jatim - Belanjanya belum menyeluruh - Ada 31 kegiatan outputnya menyusul - Jn - Ada 3 jalur Mujur 143M, Jali 401m, Glidik 188M - Sungai mujur baru ditangani ditangani PTT 143M 	<p>semeru melalui JIC saat ini belum aktif kedepannya akan dikerjakan apabila 2025 sudah ada penandatanganan multiagreement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untk saat ini belum ada di PAGU Indikatif menunggu aktivasi loan - Untuk komponen Loannya perlu kesepakatan dengan leder karena pendanaannya bukan dari kami 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu tau Panjang tanggulnya berapa anggarannya cukup besar - Prioritaskan berapa panjangnya apakah tanggulnya dulu atau dll - Saran diakomodir dengan menunggu loan dan sesuai anggaran - Semua harus diantisipasi di 3 jalur, namun perlu jalur prioritas <p>TRPB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betul di PUPR - Nanti TRPB hanya mengawal BNPB - Dilakukan untuk pengurangan risiko bencana di Jatim 		
No	Usulan	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		Usulan	Kesepakatan					
4	Pembangunan dan Revitalisasi Museum PETA	1	1	Paket	Kota Blitar	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Pengelolaan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan		Revitalisasi Museum dan Galeri		
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
Pemprov Jatim dan Pemkot Blitar : <ul style="list-style-type: none"> - Sudah 2x diusulkan di musrenbangnas namun selalu ditolak - Sudah ada beberapa alat peraga □ contoh kemenhan sudah mengirimkan tank, dan pangkalan udara sudah memberikan pesawat, bank jatim memberikan landasan pesawat 		Kemendikbud : <ul style="list-style-type: none"> - Sejalan dengan dit. Apk bappenas bahwa di kemendikbudristek juga belum ada rencana untuk Pembangunan fisik museum PETA ini - Dari pemerintah pusat kebijakannya hanya untuk Pembangunan museum milik pusat bukan milik daerah 		Dit. APK : <ul style="list-style-type: none"> - Di Pepres 80 ada - Di pusat belum ada untuk Pembangunan dan revitalisasi fisik dari museum ini - Yang diinginkan di daerah adalah untuk wisata atau revitalisasi museum yang eksisting? Pembangunan museum - Programnya sebenarnya ada, bisa melalui BOP 				
DIAKOMODIR Catatan : Diskresi dari PEMDA ke Bappenas dan Kemendikbud untuk rapat koordinasi lanjutan								

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<ul style="list-style-type: none"> - 25.7M anggaran □ cagar budaya, guset house, musholla, pujasera, lahan parker, dll - Lahannya tahun ini akan clear - Kesepakatan terakhir dengan walikota, apabila ada revitalisasi untuk museum PETA, saat ini museum ini adalah sebagai sekolah dan bekas asrama, dan berkeinginan untuk dijadikan museum - Sepakat untuk dihibah ke pusat dan untuk wisata kebangsaan di kota blitar - Pemerintah kota blitar menghibahkan 5ha ke kemenkumham untuk relokasi lapas dari Tengah kota ke pinggiran kota □ prosesnya hibah - Pemkot blitar tidak keberatan apabila dihibahkan ke pusat, asalkan bisa dibangun 	<ul style="list-style-type: none"> - Jadi kalau mau dibangun, asetnya akan milik pusat bukan milik daerah - Rekomendasikan Pembangunan fisik ke Kemen PUPR - Pelayanan museumnya berkoordinasi dengan Lembaga terkait 	<p>Pimsid :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semua asset akan dihibahkan ke pusat - Coba diakomodir namun ada beberapa catatan untuk dikerjakan Bersama - Solusinya harus dari kemendikbud, gabisa dari PUPR langsung, silakan kemendikbud bersurat ke PUPR untuk takeover usulan ini - Harus ditindaklanjuti oleh bappenas dan kemendikbud - Apakah pemerintah daerah sudah bersurat ke Kementerian Bappenas dan Kemendikbud? - Perlu bersurat untuk melanjutkan pembahasan ini untuk landasan <p>Pimsid 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasus perpusnas depan makam bung karno 	
--	--	---	--	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<p>untuk kepentingan nasional dan dibangun untuk Museum PETA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prinsipnya Pemkot Blitar menerima, apabila dibangun Museum tapi hibah ke pusat □ komitmen terhadap perpres 80 - Belum bersurat ke bappenas dan kemendikbut untuk koordinasi Pembangunan ini 		<p>awalnya punya daerah □ sekarang perpusnas bagus Ketika ditakeover oleh pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cukup signifikan untuk bisa diakomodir untuk dijadikan asset pemerintah pusat - Cikal bakal □ TNI, TKR, ABRI - Mekanisme pengalihan asset □ contoh konkrit nya adalah perpusnas depan makam bung karno 				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
5	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Kawasan Pelabuhan Ketapang	193 m	0	m	Kab. Banyuwangi	Kementerian Perhubungan	<p style="text-align: center;">DITOLAK</p> <p style="text-align: center;">Alasan :</p> <p>Karena Kendala Aset dan Operasionalisasi □ disarankan untuk diusulkan Ke BUMN Terkait</p>	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Prasarana Bidang Konektivitas Darat		Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)		
		Catatan dan Tanggapan						

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas	
		<p>Bappeda Jatim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saat ini untuk integrasi moda di Ketapang belum ada yang integrate dengan stasiun Banyuwangi - Saat ini belum ada jalan, total tinggi, belum ada yang landau - Mau ada jalur khusus untuk membawa barang untuk pergerakan dari stasiun Banyuwangi ke Ketapang - Ada 5 jalur KA local dari dan ke Banyuwangi - 17M - Bentuknya skybrige □ dari stasiun ke Pelabuhan Ketapang - Khusus penyebrangan penumpang tidak tersedia jalan □ makanya mengusulkan ini - Panjang 380m 	<p>Kementerian Perhubungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait skybride □ kemarin sempat DED di pusat - Hasil DED □ asetnya siapa? Operasionalnya bagaimana? Yang mengoperasikan? - Ada beberapa asset yang dilewati □ kereta, jalan, dan Pelabuhan - Bingung di asset - Siapa yang mengelola dan memelihara? - Masyarakat saat ini dengan jalan di jembatan sepanjang itu kurang minat □ jadi manfaatnya kurang - Saran : lebih manfaat jika diberi feeder yang menghubungkan dari stasiun ke Pelabuhan - USULAN DIHOLD □ karena asset - Saran terkait asen dan pengoperasian □ paling 	<p>Dit. Transportasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baik dari Ketapang atau stasiun asetnya dari BUMN - Saran □ asset ini perlu diusulkan BUMN - Karena ini diluar kementrian puasat atau kemenhub - Saran □ belum bisa diakomodir □ diusulkan ke BUMN terkait untuk skybride 	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

				tidak ada izin untuk asset jalan di bina marga dan KAI □ perlu ada kongsi					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bandara Abdurrachman Saleh	2	2	Paket	Kab. Malang	Kementerian Perhubungan	<p style="text-align: center;">DIAKOMODIR</p> <p style="text-align: center;">Catatan :</p> <p style="text-align: center;">Diskresi dari Kemenhub dengan menggunakan surat permohonan dari Pemprov Jatim dan TNI AU untuk dibawa ke TM dengan Kemenkeu dan Kemenhub.</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Prasarana Bidang Konektivitas Udara		Bandar Udara			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Jatim : <ul style="list-style-type: none"> - Pelapisan landasan pacu dengan aspal konsentrait 5M □ KEBUTUHAN ANGGARAN 81M □ standar runway □ didasarkan BA survialence dari kemenhub - Ada beberapa kerusakan runway 		Kemenhub Udara : <ul style="list-style-type: none"> - Saat ini dikelola oleh pemerintah, TNI, sipil - Tahun 2022 sudah memberikan asset - Mungkin pendanaan oleh APBD □ karena dikelola oleh daerah - Untuk diskresi □ pernah dilakukan dan dibahas lebih dalam □ namun saat 		Pimsid : <ul style="list-style-type: none"> - Ada diskresi kalua bisa - Asset AU dan TNI - Demand tidak akan nambah - Saran □ diakomodir dengan catatan diskresi dari kemenhub dan surat dari pemda dan TNI AU ke kemenhub untuk diputuskan ke pimpinan 			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan usulan ada di rencana induk bandara - Ada perjanjian Kerjasama dengan TNI AU dan pemerintah provinsi pada 2021 - Saat ini 2021-2024 □ provinsi melalui apbd di dinas perhub melakukan perbaikan dari dana APBD - Diharapkan APBN bisa kontribusi - Untuk pemeliharannya 2021 19M, 2022 13,6M, 2023 15M, 18.4M untuk 2024 dari APBD Jatim - Memang betul bandara kasih asset dari kemenhub ke pemda □ namun secara prinsip kan punyaanya kemenhub □ saat ini inginnya bandar aini bisa mensupport wilayah Selatan □ supaya ekonomi growth di wilayah Selatan - Tiap tahun hampir 20M tiap tahun dari APBD □ jika 	<p>ini tidak jadi prioritas karena ada kendala pagu indikatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan masalah pelaksanaan □ masalah pencatatan □ karena sudah serah terima asset di 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Diskresi dari kemenhub yang membutuhkan perohonan dari pemprov dan TNI AU <p>Dit. Transportasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sejak rakortek sudah koordinasi dengan pimpinan - Kendala di asset dengan TNI dan PEMDA - Kendala aspek akuntabilitas dan kewenangan □ perihal regulasi - Menurut pimpinan □ jika argumentasi secara traffic bahwa band aini perlu peningkatan terkait keselamatan □ usulan bisa diakomodir □ akan dibahas ke pembahasan TM ke Kemenkeu dan Kemenhub 	
--	--	--	--	---	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<p>dibebankan terus ke APBD maka kami berpikir untuk mengembalikan ke kemenhub supaya tidak ada persoalan jika mau menganggarkan untuk perbaikan bandara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimohon dukungan dari pusat □ karena APBD tidak selamanya cukup - Selama ini provinsi tidak pernah menerima anggaran dari bandara □ hanya diberikan ke AL bukan ke kas daerah <p>Dishub Jatim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harapan bisa dilaksanakan □ urgent □ terkait faktor keselamatan 					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
7	Rehabilitasi Kerusakan Lahan	26.9	26.9	ha	Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Madiun Kab. Gresik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		Agenda Pembangunan	Sasaran Visi	Arah Pembangunan Nasional		
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	15 - Lingkungan Hidup Berkualitas		
		Program	Kegiatan	KRO	RO	
		Program Kualitas Lingkungan Hidup	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	Luas Lahan yang Difasilitasi Pemulihannya	
		Catatan dan Tanggapan				
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas		
		Pemprov Jatim : <ul style="list-style-type: none"> - Urgensi dari usulan ini terkait dengan IKLH di Jawa Timur terkait dengan tutupan lahan - Ada 2 lokasi □ desa sumberjo kab malang (tambang andesi) □ perlu sumber air dan penanaman kembali dan desa suci bekas tambang andesi□ lokasi ex tambang perlu penanaman Kembali - Anggaran 5.38 M - Dari provinsi baru bisa mensupport untuk fasilitasi dan rehabilitasi kerusakan lahan untuk tahun 2025 □ untuk 	Biro Perencanaan, KLHK : <ul style="list-style-type: none"> - Usulan ini berada di luar atau di dalam Kawasan hutan? Ada di luar Kawasan hutan - Penanaman atau apa? Penanaman di luar Kawasan hutan - PPKL skemanya berbeda tergantung hasil diskusi dengan dit. Terkait - Secara RO bisa diakomodir, namun sudah ada longlist yang tersusun, dan perlu menyesuaikan prioritas. - PEMDA diharapkan menyediakan dokumen yang diperlukan (Lokasi, 	Dit. LH : <ul style="list-style-type: none"> - Secara RO ada, namun untuk lokpri dipastikan terlebih dahulu bisa diakomodir atau tidak - Perlu pertimbangan dengan longlist lokpri yang sebelumnya Dit. KKSDA <ul style="list-style-type: none"> - Nomenklatur diganti jangan rehabilitasi, namun pemulihan lahan akses terbuka bekas tambang ; karena rehabilitasi identic dengan penananman. 	<p>DIAKOMODIR</p> <p>Catatan : Melihat kemampuan anggaran dan penentuan lokasi prioritas</p>	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<p>penanaman dan sumur perlu diajukan ke pusat dengan APBN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk rehab lahan ini diutamakan untuk peningkatan IKL prov Jatim, hingga tahun 2023 IKL Jatim masih dalam kategori kurang □ berharap ada bantuan dari Kementerian pusat untuk rehab lahan ini - Berdasar pemetaan citra 1 □ Jatim kurlleb terdapat 280 titik potensi akses lahan terbuka - Di bidang LH ada indicator baru □ IPKH □ ada komponen rehab hutan dan lahan □ diharapkan dapat meningkatkan IKL dan capaian IPKH Jatim - IKLH □ dalam kategori Sedang - Indeks Kualitas Lahan □ dalam kategori Kurang 	<p>Data Kerusakan, penyebab kerusakan) □ melakukan FGD dengan Masyarakat sekitar</p>		
--	--	--	--	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		DLH Jatim : <ul style="list-style-type: none"> - KLHK biasanya diawali dengan DED, nanti akan dilakukan analisis akan dilakukan rencana lanjutan. - Untuk lokasi malang, tahun lalu berhasil usulan ke KLHK untuk mengakomodir dan diberikan 200 juta □ dapat penanaman, dan fisiknya gazebo dan papan nama - Untuk kebutuhan sesuai DED adalah Air □ makanya dilakukan usulan lagi 					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
8	Pembangunan dan Rehabilitasi Pelabuhan	8	1	Lokasi	Kab. Sumenep	Kementerian Perhubungan	DIAKOMODIR 1 LOKASI Catatan : Melakukan monitoring dan evaluasi hasil
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
		Program	Kegiatan	KRO	RO		
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		Catatan dan Tanggapan			Pembangunan sebelumnya dan sertakan output dari anggaran yang diusulkan
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas	
		<p>Pemprov Jatim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 pelabuhan yang diusulkan - Kalianget 2.5M untuk melanjutkan fasilitas sdermarga 2023 o/ kemenhub - Pagungan - Penyembrangan 8M □ kerusakan berat dan penurunan produktivitas - Tangayang 8M □ kapal penyebrangan lintas wilayah - Penyebrangan RAAS Tahap 1 □ 8M □ fasilitas sandar - Sameken 8M - Rehab Pelabuhan Branta - Sesuai dengan SK Menteri Pehubungan dalam rencana induk Pelabuhan, Pelabuhan sapudi dan pagungan merupakan 	<p>Kementerian Perhubungan :</p> <p>Pelabuhan Penyebrangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Kalianget (Diakomodir. Sebelumnya sudah ada pembangunan 70M 2 tahun lalu, belum ada DED, jika ingin pengajuan lagi, maka lakukan monev dan output yang aka nada dari usulan 2.5M, dibicarakan untuk usulan tahun depan) - Pelabuhan Sapudi (Tidak diakomodir. karena masalah asset belum dihibahkan, DED di pusat tidak ada, jika DED di dishub jatim ada silakan ekspos di pusat, jika tahun ini dihibahkan ke pusat dan ada DEDnya maka bisa diusulkan di tahun 2025. DED tidak ada di dishub 	<p>Pimsid :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sapudi (pusat dengan APBN) dan kalianget udah diakomodir - Ada 3 ditolak : tangean, raas, sapeken - Branta dan pagurungan : belum tau statusnya - Anggaran turun di 2025 	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<p>pelabuhan pengumpulan regional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika tidak disupport maka berat jika mengandalkan APBD - Perlu dikresi <p>Dishub Jatim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 usulan penyebrangan : kaliangget, sapudi, kangean, raas, dan sapeken - Pelabuhan laut : penguangan □ rencana Pelabuhan - Pelabuhan laut : rehabilitasi Pelabuhan laut Branta □ masih kewenangan pemprov jatim namun belum P3D □ kerusakan cukup berat □ asetnya belum milik dishub jadi belum bisa dilakukan - Sapudi ada 2 yakni penyebrangan dan lautnya □ yang penyebrangan 	<p>jatim karena bukan asset daerah, ini hanya menyamakan arahan dari pemkab. SEGERA LAKUKAN DEDA DAN JIKA SUDAH SELESAI BISA DIAKOMODIR DI 2026)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kangean (Tidak Diakomodir. Sudah diusulkan untuk kegiatan rehab □ permasalahan dengan asset dan harus dihibahkan dulu, ada opsi lain dengan DAK menu rehab Pelabuhan □ coba diajukan ke Dit. Transport untuk lokprinya) - Pelabuhan Raas (Tidak diakomodir dengan catatan sama) - Pelabuhan Sapeken (Tidak diakomodir dengan catatan sama) 		
--	--	--	--	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<p>belum existing □ yang Pelabuhan sapudi penyebrangan yang belum diakomodir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari pemkab sumenep belum bisa mengakomodir untuk operasionalnya makanya dibawa ke musrenbang ini - Terkait usulan yang dalam kewenangan kemenhub □ yang belum ada kepastian adalah Pelabuhan laut pagungan dan Branta, bagaimana? - Branta secara hirarki adalah Pelabuhan pengumpan regional □ belum P3D □ masih asset kemehub □ usulan ke pusat - Pagungan □ Pelabuhan lokal □ hirarkinya ke kab. Sumenep □ menurut aturan menyebutkan bahwa Pelabuhan pengumpan regional 	<p>Pelabuhan Laut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagerungan : (Diusulkan ke Kemenhub) harus diserahkan ke pusat □ distatus masih A2 dan PL □ belum ada pelabuhan sama sekali □ jika memang belum ada maka harus diusulkan dulu ke pusat dan mnegajukan studi awal ke dit. Kepelabuhan atau perhubungan laut dan nantinya akan dilakukan studi feasibility, kemudian diusulkan beberapa lokasi. - Brantah : (Diusulkan Ke Kemenhub) ini merupakan pengumpan regional □ belum diasset ke daerah, operasionalnya masih kemenhub, usulannya adalah rehab, masih akan melakukan studi lebih lanjut dengan RKK dan 		
--	--	--	--	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<p>sudah kewenangan pemerintahan daerah namun setelah P3D □ maka minta bantuan ke pusat karena saat ini Pelabuhan belum exsit dan belum ada dermaga sama sekali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan pagungan ini untuk awal kami serahkan ke pusat □ karena kalua ke lokal kab sumenep tidak cukup anggarannya - Sapudi ada laut dan penyebrangan □ sapudi asset pemkab supenep □ tahun ini akan dihibahkan ke pusat - Pelabuhan Kalianget □ bukan operasional dishub jatim □ hanya menyampaikan Amanah dari BPTB kelas 2 (datanya belum ada), operasional dari pemkab sumenep□ dibandingkan dengan 	<p>DELH dengan anggaran 521 Juta</p>		
--	--	--	--------------------------------------	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<p>sapudi dan kangean ini sudah better</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prioritas selain kalianget itu apa aja? 							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
9	PSDKU Vokasi untuk Pembangunan Politeknik	6	0	Paket	Kab. Probolinggo Kab. Magetan Kab. Lamongan Kab. Bangkalan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<p style="text-align: center;">DITOLAK</p> <p>Catatan : (Namun Usulan ini diprioritaskan untuk diakomodir di DAK 2025 dengan menu yang eksisting di DAK 2025)</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Indus	PEC - Kerja sama		Kemitraan antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		<p>Pemprov Jatim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun politeknik disbanding untuk membangun SMK 		<p>Kemendikbudristekdikti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyarankan untuk menggunakan DAK untuk Pembangunan sarana dan 		<p>Pimsid 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menu apa saja yang tidak ada di DAK? 			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<ul style="list-style-type: none"> - 6 lokasi SMK sudah seattle - Diusulkan untuk USP - Dari Kemdikbud mengarahkan ke DAK □ namun di DAK kan tidak semua ada menunya - Usulannya adalah USP di 6 Lembaga - 6 lembaga ini sudah berdiri - SMKN Maritim Jatim, Kab. Lamongan □ banyak hasil pengelolaan ikan - SMKN 1 Sukapura □ keunggulan di bidang wisata, lahannya sedikit - SMKN 1 Wonokerto, Probolinggo - SMKN 1 Lumbang, Probolinggo - SMKN 1 Tanjung Bumi, Bangkalan □ sekolah sudah berdiri, namun belum ada Gedung sendiri, masih Bersama dengan SMP sekitar 	<p>prasarana □ karena tidak termasuk SMK pusat keunggulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jika berdasarkan kewenangan di musrenbangnas ini cukup sulit, secara umum di DAK bidang Pendidikan - Secara umum dapat diakomodir untuk DAK 2025 - Jika ditolakpun dengan catatan, namun bisa diakomodir untuk di DAK (namun dengan catatan tidak sepenuhnya diakomodir) <p>Dit. APK :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selama redliness kriterianya disampaikan, maka bisa diakomodir ke DAK 	
--	--	---	---	---	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<ul style="list-style-type: none"> - SMKN Lembayang, Magetan ☐ belum ada sekolah untuk jenjang SMK ☐ Pemkab Magetan menghibahkan lahan untuk membangun bangunan yang saat ini sudah ada dari pendanaan APBN dan APBD - Usulan Pak Malik ☐ jenjang D1 dan D2 ☐ bentuknya SMK tidak dalam bentuk politeknik - Untuk SMK kebijakan daerah ☐ namun di DAK tidak ada menunya - Kebutuhan asrama dan sarpras, Pembangunan kelas baru, toilet, ruang guru, dan peralatan belajar mengajar☐ butuh banyak biaya 					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
10	Pengadaan Kapal Perintis	1	1	Paket	Kab. Banyuwangi Kab. Probolinggo	Kementerian Perhubungan	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

				Kab. Sampang Kab. Sumenep Kota Surabaya		<p style="text-align: center;">DIAKOMODIR</p> <p style="text-align: center;">Catatan :</p> <p>Menunggu hasil evaluasi dan hasil Rakornis Perintis. Rakornis diharapkan dapat mempertimbangkan hasil dari Musrenbangnas 2024</p>
Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		11 - Stabilitas Ekonomi Makro		
Program	Kegiatan	KRO		RO		
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Dara	Sarana Bidang Konektivitas Darat		Kapal Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)		
Catatan dan Tanggapan						
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
<p>Bappeda Jatim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan dengan skema subsidi ke swasta □ di 2022 dengan anggaran 10M, ditahun berikutnya ditambah 15M □ dari operator tidak ada yang berminat □ profit margin yang dihasilkan tidak menguntungkan. - Mengusulkan kapal perintis □ dari segi efisiensi lebih masuk untuk meningkatkan 		<p>Kementerian Perhub Darat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebih ke pelayanan □ ada PBN untuk subsidi penyebrangan □ kalianget raas jangkar dan kalianget sapudi jangkar - Perlu studi lanjut □ perlu subsidi baru atau sudah terlayani dengan baik - Cek demand dulu - Lihat faktor-faktornya, dan demandnya □ jika bagus maka akan tambah treatnya 		<p>Pimsid :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diharapkan bisa membahas dan membalas surat yang disampaikan oleh daerah untuk kemenhub - Diharapkan bisa dilaksanakan di tahun 2025 - Hasil rakornis diharapkan dapat mempertimbangkan hasil pada pembahasan Musrenbangnas 2024 		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<p>efektifitas dan kebermanfaatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - FS dan DED sudah ada. - Ada kajian teknis 2018 dan pengujian resistance kapal perintis 2019. - Melayani 7 pelabuhan - 1 kapal = 100M <p>Dishub Jatim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapal untuk angkutan laut bukan penyebrangan - Jika tidak bisa membangun kapal, maka mengajukan peningkatan trayek R15 dan R17 bisa 1 minggu saja jangan 2 minggu. - Untuk trayek rute ini sudah diusulkan dengan tanda tangan bu Khofifah - Untuk surat pengusulan akan kami perbaharui, saat ini stuck di ttd pak gubernur - Untuk Pelabuhan pagerungan sudah pernah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika sudah ada FS dan DED maka akan kita ekspos dulu ke dit. Sarana - DAK tidak ada kapal perintis □ DAK ada pada kapasitas 30 GT <p>Kementerian Perhubungan Laut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Pembangunan kapal saat ini ada kesulitan - Untuk peningkatan trayek perintis □ akan diusulkan terlebih dahulu dari perintis ke Tingkat 2 □ rakor perintis □ ada usulan dari pemda - Untuk trayek eksisting harus ada evaluasi dulu sebelum pengusulan peningkatan layanan - Untuk Pelabuhan bisa koordinasi dengan UPT setempat untuk mengawal jalannya usulan tersebut - Untuk trayek akan dibahas lebih lanjut di rakornis 		
--	--	---	--	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<p>mengusulkan ke kemenhub dari 19 des 2024</p> <p>- Untuk brantah juga sudah memberikan usulan pada 19 april 2024</p>							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
11	Lanjutan Pengendalian Banjir Sungai Buntung (akses Bandara Juanda)	2	2	Paket	Kab. Sidoarjo	Kementerian PUPR	<p style="text-align: center;">DIAKOMODIR</p> <p>Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Panta	Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		Prasarana pengendali daya rusak air yang dibangun			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
12	Pembangunan Jalan Pansela	23.44	23.44	km	Kab. Blitar	Kementerian PUPR	<p style="text-align: center;">DIAKOMODIR</p> <p>Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
13	Sentra Pengolahan Perikanan Bengkorok (UMKM Terpadu)	1	1	Paket	Provinsi Jawa Timur Kab. Trenggalek	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<p style="text-align: center;">DIAKOMODIR</p> <p>Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Kemitraan dan Perluasan Pasar UKM	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Jaringan Pemasaran yang diperluas dan dibentuk	Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.			
Catatan dan Tanggapan									
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.	Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
14	Pembangunan Intake Sungai Rejoso (1000Lt/dtk) dan Jaringan Pipa Transmisi SPAM Regional Umbulan	3132	3132	m	Kab. Pasuruan	Kementerian PUPR	DIAKOMODIR Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		Pembangunan SPAM Regional			
		Catatan dan Tanggapan							
				Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga			Direktorat Sektor Bappenas	
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.	Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

15	Pembangunan IPA Kali Rejoso (1000Lt/dtk) SPAM Regional Umbulan	1000	1000	Lt/dtk	Kab. Pasuruan	Kementerian PUPR	<p style="text-align: center;">DIAKOMODIR</p> <p>Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.</p>	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		Pembangunan SPAM Regional		
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
<p>Dinas PUPR Cipta Karya Jatim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pembahasan serah terima biaya operasional □ sebelum bahasan ini sempat di sounding, namun belum di level top, baru di level middle. □ belum ada yang berkenan menyampaikan pendapat terkait serah terima biaya operasional □ karena akan dilakukan pembahasan di Tingkat tinggi - Belum ada pembahasan biaya tarif □ kalua di perjanjian Kerjasama ini 		<p>Kementerian PUPR :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berarti ada penambahan operasional, apakah daerah sudah tau? - Khawatir jika sudah dibangun namun ada pembahasan lanjutan terkait tarif dan lain-lain - Diharapkan adanya kajian biaya operasioanl untuk biaya tarif 		<p>Pimsid 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saran : Diakomodir (dengan catatan perlu melakukan diskusi pendalaman teknis usulan dalam forum bilaterall dantrilateral meeting, terhadap penyusunan Renja KL) 				

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		adalah kewajiban pemprov jatim untuk biaya tarifnya.							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
16	Revitalisasi Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Kabupaten-Kota Probolinggo	8775	8775	m	Kab. Probolinggo Kota Probolinggo	Kementerian PUPR	<p style="text-align: center;">DIAKOMODIR</p> <p style="text-align: center;">Catatan :</p> <p>Mempertimbangkan Keputusan Pimpinan Dari Hasil Pengajuan Surat Diskresi Dari Pemprov Ke Pusat</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		Peningkatan SPAM Regional			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Pemprov Jatim : <ul style="list-style-type: none"> - Sudah diakomodir namun mau dibahas lagi - Semua RC sudah terpenuhi dan tahun 2023 sudah disetujui di musrenbangnas - Perlu surat dari pemerintah daerah 		Kementerian PUPR : <ul style="list-style-type: none"> - Asset PEMDA □ perlu surat diskresi dari PEMDA ke PUPR agar dapat langsung ditangani - Saat di Rakortek belum clear terkait asetnya, makanya bisa diakomodir 					

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan di rakortek oke diakomodir - Ketika dibahas lagi perlu diskresi perlu menyurat ke Kementerian terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Setelah clearance ternyata asetnya punya PEMDA 						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
17	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mojolagres (100Lt/detik)	100	100	L/detik	Kab. Mojokerto	Kementerian PUPR	DIAKOMODIR Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		Peningkatan SPAM Regional			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
18	Preservasi Jalan	2.2	2.2	Km	Kab. Gresik	Kementerian PUPR	DIAKOMODIR		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

	mendukung JIPE Gresik Ruas Sadang (Bts. Kab. Lamongan) - Bts. Kota Gresik	01 - Transformasi Sosial		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.		
		Program		Kegiatan		KRO			RO	
		Program Infrastruktur Konektivitas		Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)	
		Catatan dan Tanggapan								
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan			
		Usulan	Kesepakatan							
19	Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Nasional Ruas Bulu (Bts. Kab. Jateng) - Bts. Kota Tuban	9.8	9.8	km	Kab. Tuban	Kementerian PUPR	DIAKOMODIR Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.			
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional				
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
		Program		Kegiatan		KRO		RO		
		Program Infrastruktur Konektivitas		Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)		
		Catatan dan Tanggapan								
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas						

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.	Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.	Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
20	Lanjutan Pengendalian Banjir Sungai Lamong	1550	1550	m	Kab. Gresik	Kementerian PUPR	<p style="text-align: center;">DIAKOMODIR</p> <p>Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		Prasarana pengendali daya rusak air yang dibangun			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.			

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

21	Early Warning System Tsunami	161	0	Lokasi	Kab. Pacitan Kab. Trenggalek Kab. Tulungagung Kab. Blitar Kab. Malang Kab. Lumajang Kab. Jember Kab. Banyuwangi	BMKG	<p>DITOLAK</p> <p>Alasan :</p> <p>(harus ada koordinasi antara PEMPROV JATIM, BMKG, DAN BPBD)</p>	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG	Pelayanan Publik Lainnya		Layanan Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas		
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
		<p>Pemprov Jatim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada data terakhir terkait pengasangan EWS dari BMKG - Desa dengan risiko tinggi tsunami - Belum ada data terkait WRS dari BMKG dan 		<p>BMKG :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memasang WRS dalam 30 lokasi □ BPBD, Kantor Bupati, Walikota, dll - Secara nasional menargetkan 600an - Jika pemerintah daerah berkeinginan untuk embangun sendiri 		<p>Dit. LH :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk EWS ini apakah sudah dipasang? - Di rakortek tidak sebanyak ini - Bukan ranah BMKG - Biasanya selanjutnya ke BPBD untuk menginformasikan ke 		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<p>belum tau kalua sudah dipasang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk 161 unit ini dilakukan di 8 kabupaten dengan risiko potensi tsunami tertinggi - Musren tahun lalu usulan ke BNPB namun diminta ke BMKG - Namun tahun ini usulan sudah diperbarui diarahkan ke BMKG, namun dikembalikan ke BNPB - BMKG sudah memasang 30 WRS di 30 lokasi yang berlokasi di kantor-kantor BPBD dan kepala daerah □ saat ini dibutuhkan EWS di daerah yang rawan tsunami □ memang di kantor pimpinan sudah ada di daerah tersebut □ kalua di sepanjang garis pantai ini belum ada dan jauh dari kantor-kantor 	<p>system ini □ dikoneksikan dengan BMKG supaya tidak ada perbedaan data</p> <ul style="list-style-type: none"> - 161 unit ini lumayan banyak □ kapasitas WRS cukup besar mencapai 1000 kapasitas - Perlu dikaji ulang untuk jumlahnya - Pemasangan WRS dipasang dalam stakeholder yang berperan dalam penanggulangan bencana □ BPBD, Kodim, Polres, dll - Tahun depan (2025) BMKG akan memasang tide gauge di 3 pelabuhan - 161 EWS ini apakah ada pada sisi upstream atau downstream? kalau di upstream lebih prioritas ke stakeholder ke yang akan turun langsung ke pencegahan bencana - Untuk case bawen ini adalah case baru 	<p>masyarakat terkait bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari BMKG sudah disediakan semua terkait hal ini - Jangan sampai salah meminta ke BMKG - WRS sudah ada semua di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur - Perhitungan BMKG terkait WRS sudah solved semua - BMKG penyediaan WRS aja, untuk downstreamnya ini kewenangan BPBD untuk yang TOA, dll. - Mungkin yang dimaksud adalah pemasangan alarm-alarm alat-alat yang nantinya akan dicatatnya ke WRS. <p>Pimsid 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saran diakomodir dengan mempertimbangkan jumlah lokasi yang diusulkan sesuai dengan 	
--	--	--	--	---	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		<p>pimpinan yang sudah terpasang EWS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika gabisa diusulkan ke BMKG, lalu diusulkan kemana? - Jika tidak sanggup 161 EWS, kiranya BMKG mampu berapa? - 161 lokasi ini merupakan lokasi yang sudah dianalisis di titik titik kejadian bencana sepanjang garis pantai <p>BPBD Provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yang 161 ini downstream ke lokasi yang ada di garis pantai - Setelah gempa yang terjadi di Jatim (Bawen) maka alat EWS ini dibutuhkan, terutama di kepulauan - Saat ini EWS ada di kantor BPBD sementara gempa jatim ini beberapakali terjadi dikepulauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Contoh EWS punya sumbar itu downstream dikelola BNPB - Untuk kasus jatim ini lebih cocok dikoordinasikan dengan BNPB ada program Pembangunan EWS menggunakan TOA - Untuk daerah kepulauan di Jatim yang belum memiliki EWS bisa diajukan. - Untuk usulan ini BMKG keberatan karena ini merupakan kewenangan BNPB - Secara jumlah untuk pemasangan WRS nasional sudah terpenuhi - Kami bisa melakukan maintenance pada lokasi yang sudah terpasang hanya yang sudah terpasang dan tidak menambah jumlah - WRS sudah dihitung kebutuhan secara nasional 	<p>analisis kebutuhan pada forum bilateral dan trilateral meeting</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apa yang bisa disupport BMKG dari EWS (jika memang ini dikatakan masih usulan general) - Ini kewenangan BPBD untuk downstreamnya, dan bisa masuk ke DAK Bencana jika ada. - Masih ada misspersepsi terkait alat-alat yang dimaksud 	
--	--	--	---	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		- Dari daerah inginnya apapun yang penting Masyarakat tau jika ada bencana yang akan datang (mau itu EWS, WRS, dll)		□ hingga 2024 □ saat ini yang dilakukan BMKG hanya maintenance kerusakan saja dan tidak menambah jumlah						
				- Saat ini fokusnya adalah pemasangan peralatan yang bisa mengukur tinggi gelombang laut						
				- Perlu pendanaan yang sangat tinggi karena lokasi sepanjang garis pantai itu banyak						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan			
		Usulan	Kesepakatan							
22	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Beran	1	1	Paket	Provinsi Jawa Timur Kab. Ngawi	Kementerian PUPR	DIAKOMODIR Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.			
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional				
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
		Program		Kegiatan		KRO		RO		
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung		Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar		
		Catatan dan Tanggapan								

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.			
23	Pelebaran Jalan Nasional Situbondo - Ketapang	10	10	km	Kab. Banyuwangi Kab. Situbondo	Kementerian PUPR	<p style="text-align: center;">DIAKOMODIR</p> <p style="text-align: center;">Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.			
		Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
24	Pengadaan dan Pemasangan	7985	7985	Unit	Provinsi Jawa Timur	Kementerian Perhubungan	DIAKOMODIR		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

	Perengkapan Jalan di Jalan Nasional	02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.				
		Program		Kegiatan		KRO			RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas		Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat		Sarana Bidang Konektivitas Darat			Perengkapan Jalan (Prioritas Nasional)			
		Catatan dan Tanggapan										
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas						
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan					
		Usulan	Kesepakatan									
25	Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	2		2		Paket		Kota Blitar Kota Pasuruan		Kementerian PUPR		DIAKOMODIR Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional						
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
		Program		Kegiatan		KRO		RO				
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		Penyediaan Akses Rumah Layak Huni		Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		Bantuan Pembangunan Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja				
		Catatan dan Tanggapan										
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas								

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.	Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.	Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
26	Preservasi Jembatan Manyar mendukung JIPE Gresik	160	160	m	Kab. Gresik	Kementerian PUPR	DIAKOMODIR Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)			Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
27	Pengembangan Perhutanan Sosial melalui Sarana	135	135	Kelompok	Kab. Tulungagung Kab. Blitar Kab. Malang Kab. Lumajang Kab. Jember	KLHK			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

	<p>Ekonomi Produktif, Penyediaan Tenaga Pendamping, Fasilitasi Penyusunan dan Pengesahan Rencana Kerja / Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial, dan Fasilitasi peningkatan KUPS ke kelas Gold</p>				Kab. Banyuwangi Kab. Situbondo Kab. Pasuruan Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Ngawi Kab. Bojonegoro Kab. Lamongan Kota Batu		<p>DIAKOMODIR</p> <p>Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.</p>	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketiimpangan		05 - Penerapan Ekonomi Hijau		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Kehutanan		
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		
		No	Usulan	Volume		Satuan		Lokasi Kab/Kota
Usulan	Kesepakatan							
28	Revitalisasi Pelatihan	2	2	Paket	Provinsi Jawa Timur	Kementerian Ketenagakerjaan		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

	Vokasi di UPT BLK Surabaya				Kota Surabaya		DIAKOMODIR
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata	
		Program	Kegiatan	KRO		RO	
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas	Sarana Bidang Ketenagakerjaan		Transformasi BPVP Baru	
		Catatan dan Tanggapan					
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas	
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.	
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
29	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Sistem Pemagangan dalam Negeri	542	542	Orang	Provinsi Jawa Timur	Kementerian Ketenagakerjaan	DIAKOMODIR
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata	
		Program	Kegiatan	KRO		RO	
		an Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Koordinasi		Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan dan	
		Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.					

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

						Pemagangan bersama Industri				
Catatan dan Tanggapan										
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas					
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.	Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan			
		Usulan	Kesepakatan							
30	Sambungan Listrik Gratis bagi Rumah Tangga Miskin di Wilayah Madura	42000	42000	Rumah Tangga Miskin	Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep	Kementerian ESDM	<p style="text-align: center;">DIAKOMODIR</p> <p style="text-align: center;">Catatan : Perlu melakukan proses diskusi pendalaman teknis usulan dalam Forum Bilateral dan Trilateral Meeting terhadap penyusunan Renja K/L.</p>			
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional				
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				
		Program	Kegiatan	KRO		RO				
		Program Energi dan Ketenagalistrikan	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Bantuan Peralatan / Sarana		Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T				
		Catatan dan Tanggapan								
				Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga			Direktorat Sektor Bappenas		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.	Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.	Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
31	Revitalisasi SMK (pembangunan dan pengembangan SMK, serta pengadaan alat latih dan infrastruktur)	5	0	Paket	Kab. Trenggalek Kab. Malang Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Sampang	Kemendikbudristek	<p style="text-align: center;">DITOLAK:</p> <p style="text-align: center;">Catatan :</p> <p style="text-align: center;">diarahkan diajukan melalui skema DAK sesuai dengan kesepakatan pada Forum Rakortekrenbang Tahun 2024.</p>	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0		
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
32	Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis	1000	0	Ha	Kab. Jember Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Bangkalan	KLHK		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

	melalui Pengembangan / Penguatan Hutan Rakyat dan pembangunan prasarana penahan erosi dan limpasan				Kab. Sampang		DITOLAK Catatan : diusulkan melalui mekanisme DAK sesuai dengan arah kebijakan DAK Tahun 2025, sesuai dengan hasil kesepakatan pada Forum Rakortekrenbang Tahun 2024
		Agenda Pembangunan	Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		15 - Lingkungan Hidup Berkualitas		
		Program	Kegiatan	KRO	RO		
		Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rehabilitasi Hutan	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif		
		Catatan dan Tanggapan					
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.	Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
33	Pengembangan RSUD Dungus Madiun	1	0	Paket	Kab. Madiun	Kemenkes	DITOLAK Catatan :
		Agenda Pembangunan	Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TIMUR

		01 - Transformasi Sosial	02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan	01 - Kesehatan untuk Semua	diarahkan melalui skema pendanaan DAK, sesuai dengan hasil kesepakatan pada Forum Rakortekrenbang Tahun 2024	
		Program	Kegiatan	KRO		RO
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sarana Bidang Kesehatan		Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Surabaya (rujukan)
		Catatan dan Tanggapan				
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas		
		Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.	Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.	Catatan sesuai dengan catatan yang ada pada hasil Rakortekrenbang 2024.		

3. REKAPITULASI

HASIL KESEPAKATAN	TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
Diakomodir	27
Ditolak	6
Tidak Terbahas	0